

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, rakyat Indonesia dijamin melalui berbagai program pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 menjamin bahwa rakyat Indonesia akan memperoleh melalui berbagai kegiatan pembangunan nasional dan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran keberhasilan pembangunan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau kemegahan pembangunan fisik. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan yang mendukung rakyat, menentang kemiskinan, dan menentang kesenjangan (Bawazier, 2017).

Tujuan dari gerakan nasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah terutama untuk para perempuan Indonesia yang merupakan salah satu pelopor sumber daya manusia yang mempunyai potensi sangat dalam untuk menentukan arah keberhasilan suatu pembangunan dan juga mendorong keluarga dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk sosial, ekonomi, dan kesehatan, pemberdayaan perempuan berarti suatu upaya menumbuh kembangkan potensi dan peran perempuan dalam semua dimensi kehidupan, di harapkan perempuan mampu untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut, melalui PKK, karena PKK merupakan suatu wadah/organisasi yang bertujuan khususnya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di gunakan sebagai sarana guna kelancaran kegiatan pembinaan kepada masyarakat khususnya perempuan untuk peningkatan kualitas sumber daya perempuan (Herlina, 2019).

Berdasarkan surat kawat Mendagri No.SUS.3/6/12, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1972. Pada saat itu, kata "PKK" masih berarti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di era reformasi saat ini, di mana paradigma baru pembangunan melalui otonomi daerah telah muncul, ada dasar persetujuan untuk mengubah nama organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Wahyuni, 2018). Dengan adanya seminar tersebut 10 tahun kemudian Kementerian Pendidikan bersama Kementerian lainnya berhasil menciptakan 10 rumusan Segi Kehidupan keluarga yang dinilai sebagai kunci dan syarat jitu dalam membangun keluarga yang sejahtera dan berbobot.

Dengan adanya program PKK ini dimulai sebagai awal upaya Pemerintah dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga yang dilandasi dengan 10 rumusan segi tersebut.

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), merupakan sebuah organisasi yang ada di Indonesia yang memiliki tujuan utama untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. PKK berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program-program yang melibatkan perempuan sebagai pilar utama. Pemberdayaan perempuan, khususnya ibu-ibu, dalam sektor ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan kesejahteraan. Ketika perempuan mendapatkan pendidikan yang baik, memiliki hak atas kepemilikan, serta memiliki kebebasan untuk bekerja di luar rumah dan memperoleh pendapatan sendiri, hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan dalam rumah tangga (VH Susilowati, 2016 & Izzati, 2018 dalam Rismawati, Syaharany & Septianawati, 2025).

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah suatu tempat untuk perempuan dalam mengembangkan kemampuan maupun potensi yang ada dalam dirinya secara mandiri demi mengatasi masalah yang ada dalam dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas hidupnya. Dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia No 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tujuan dari PKK adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera tanpa membedakan golongan, suku, ras, dan agama (Devfa, Mardhiah, 2022).

Program ini dibentuk dan diatur oleh para Tokoh/Pemuka masyarakat, para istri kepala Dinas, para ibu-ibu Rumah Tangga (IRT), kegiatan ini didukung oleh anggaran pendapatan serta uang belanja daerah, Program Kesejahteraan Keluarga

(PKK) ini memiliki 10 program, beberapa tahun belakangan, Program PKK ini juga merupakan salah satu bentuk Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang sengaja dibentuk untuk tumbuh dari bawah, yang awal pengelolaannya itu dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. program PKK ini telah memiliki fokus terhadap program-program yang lebih spesifik yang tentunya memiliki fokus dan tujuan untuk kesejahteraan kehidupan keluarga dan masyarakat. yaitu, 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, 2. Gotong Royong, 3. Pangan, 4. Sandang, 5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, 6. Pendidikan dan Ketrampilan, 7. Kesehatan, 8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, 9. Kelestarian Lingkungan Hidup dan yang terakhir 10. Perencanaan Sehat (Jovani, 2016)

Kebijakan dibuat untuk melakukan sebuah peningkatan yang berkelanjutan agar terstruktur, mulai dari pembangunan dan pelatihan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan dari kepala desa dalam membuat sebuah program untuk mensejahterakan masyarakat, program yang dibuat itu ialah Program PKK yang dijalankan oleh para wanita. Sebelum berganti nama menjadi seperti sekarang ini Program Pemberdayaan Keluarga (PKK) (Xie et al., 2021 dalam Devfa & Nellis Mardhiah, 2022). Program ini pertama kali dibentuk dan dikenal dengan nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang tentunya memiliki nama sebutan yang sama yaitu (PKK). Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kawat kepada Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 27 Desember 1972 untuk menetapkan perubahan nama tersebut.

Dengan adanya perubahan nama ini, program PKK ini juga tentunya memiliki perubahan tujuan dan maksud yang jauh lebih serius dan spesifik untuk meningkatkan memberdayakan keluarga dan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya perubahan yang dilakukan ini Menteri Dalam Negeri berharap dapat mewujudkan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

Terdapat beberapa hal utama yang menjadi alasan mendasar adanya perubahan nama dan juga perubahan struktur pada Program PKK ini, karena Program PKK yang dibentuk sejak awal dianggap tidak berstruktur dan tidak sesuai dengan fokus dan tujuan utamanya yaitu “pemberdayaan” dalam mendorong pembangunan masyarakat, kemudian alasan perubahan selanjutnya karena nama tersebut juga diubah dengan alasan lain yaitu PKK yang awal dianggap kurang memiliki tujuan fokus dan kesejahteraan yang sesuai karena pemerintah mengatakan jika struktur

pemberdayaan bukan hanya diperuntuhkan kepada aspek keluarga saja tetapi semua aspek dalam kehidupan harus mengalami kesejahteraan, alasan selanjutnya adanya perluasan ruang lingkup dimana dengan sistem PKK yang lama dianggap belum memiliki ruang lingkup yang luas, dan alasan yang terakhir mengapa adanya perubahan nama dan struktur yaitu karna adanya penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dimana kebutuhan masyarakat selalu mengalami perkembangan dan perubahan.

Dengan demikian, sejak awal diresmikan nama dan struktur baru Program Pendidikan Pemberdayaan keluarga menjadi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada Tahun 1972, yang dianggap berfungsi sebagai wadah yang cocok untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, relasi dan pendidikan.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan sebuah gerakan Nasional dalam tujuan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat (Rahmawati, 2019).

Dalam bidang kesehatan, PKK menyelenggarakan banyak sekali penyuluhan sosialisasi yang berguna untuk memberikan wawasan dan memebantu mereka khususnya para perempuan untuk mencegah penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker dan cancer.

Kemudian dalam bidang lingkungan PKK tentunya melakukan kegiatan rutin yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan terhindar dari banyaknya bintik nyamuk seperti kerja bakti membersihkan selokan dan tumbuhan-tumbuhan liar yang mengganggu.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ibu Ratna bahwa meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari tujuan utama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu memberdayakan keluarga. PKK sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena Program PKK yang ada di Kelurahan Jatirangga telah berhasil mengajarkan setiap masyarakat khususnya perempuan yang bergabung untuk mampu membuat barang berguna yang berupa (tempat tisu, tas, topi caplin, dompet) barang itu dibuat menggunakan barang bekas yang diolah menjadi barang siap pakai dengan nilai jual yang tinggi, jasa serta keahlian. PKK juga membantu keluarga menjadi lebih mandiri dan

mengajarkan keterampilan yang dimiliki masyarakat agar mereka dapat menghasilkan uang sendiri seperti menjual hasil keterampilan tangan yang telah dibuat.

Hingga saat ini Program PKK selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman hingga saat ini, sejak dahulu awal terbentuknya PKK selalu berhasil menghadapi banyak rintangan dan selalu update dengan hal-hal yang sedang trend yang bisa ditiru untuk kegiatan luar lapangan para anggota PKK. Alasan-alasan itulah yang menjadikan landasan mengapa Program PKK masih digandrungi oleh masyarakat khususnya para perempuan dan ibu rumah tangga hingga saat ini.

Program PKK yang ada di Kelurahan Jatirangga ini telah berhasil memenangkan beberapa perlombaan. Seperti, juara 3 pada lomba Kebaya tingkat Kecamatan Jatisampurna yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2022, kemudian juara 2 pada lomba Fashion Show tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2020, dan juara 1 pada lomba tumpeng dan paduan suara tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tahun 2021. Selain itu, peneliti melihat para perempuan memiliki berbagai kerajinan seperti adanya topi caplin dan bakul yang dibuat dari bamboo yang diserut dan terdapat tanaman pangan seperti kangkung dan bayam, yang sengaja dibuat dan diperjual-belikan kemudian jika barang-barang dan sayuran ini akan dijual dan ketika laku terjual maka uang hasil penjualan dibagi rata sesama anggota.

Biasanya kerajinan tersebut dipamerkan pada masyarakat sekitar, di Kelurahan dan di event tertentu. Kemudian terdapat juga prestasi PKK lain yang ada di Indonesia, seperti Program PKK yang ada di Jawa Tengah tepatnya di Kelurahan Rengas, mereka berhasil memenangkan kejuaraan dan mendapatkan penghargaan Jambore Nasional Tahun 2017 (Aryati, 2018).

Perubahan nomenclature yang terjadi pada fungsi Program PKK tentunya memiliki beberapa tujuan penting yang mendasari perubahan tersebut, perubahan itu bertujuan untuk lebih memfokuskan lagi pada kegiatan dan program yang teratur dan konkret, selain itu dengan adanya perubahan yang nomenclature juga telah memberikan gambaran bahwa PKK merupakan suatu komunitas yang selalu berorientasi dan up-to-date terhadap perubahan zaman.

Nomenclatur Program PKK ini yang awalnya hanya berfungsi untuk meningkatkan pemberdayaan saat ini berubah menjadi beberapa bagian fungsi utama yaitu pemberdayaan perempuan masih tetap ada dalam tujuan utama PKK ini tidak berganti, kemudian terdapat tambahan tujuan yaitu pembinaan keluarga dan yang terakhir ada pengembangan usaha. Semua tujuan itu diberikan kepada para anggota dalam bentuk berupa materi, penyuluhan dan praktek secara langsung.

Dengan pemikiran perubahan nama dan struktur yang matang tersebut dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ini pemerintah mengatakan hal ini akan menjadi perubahan yang sangat bagus dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup mereka dimasa yang akan datang.

Dengan semua perubahan-perubahan yang telah ditetapkan pemerintah, hingga saat ini PKK masih berdiri tegak sebagai garda terdepan sebagai gerakan nasional yang bergerak untuk memberikan pemberdayaan kepada semua masyarakat khususnya perempuan yang butuh diperdayakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program PKK dalam mendorong para perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Jatirangga?
2. Bagaimana peran PKK meningkatkan kualitas hidup perempuan agar lebih produktif dan sejahtera di Kelurahan Jatirangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari adanya beberapa rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan yang dimaksud, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Program PKK dalam mendorong para perempuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat yang aktif di Kelurahan Jatirangga.
2. Untuk mengetahui peran PKK dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan agar lebih produktif dan sejahtera di Kelurahan Jatirangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup 2 aspek yaitu manfaat Teoritis dan manfaat Praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran bagaimana program PKK memberikan banyak ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anggota PKK yang mayoritas Perempuan.

Memberikan gambaran bahwa program PKK memberikan dampak positif dalam membangun kehidupan keluarga yang produktif dan sejahtera.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Penulis:

1. Memberikan pemahaman tentang seberapa besar pengaruh program PKK dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih produktif dan sejahtera bagi Perempuan.
2. Memberikan gambaran tentang seberapa penting program PKK sebagai sarana untuk mewujudkan dan menuangkan potensi diri para kaum perempuan guna mewujudkan kehidupan yang lebih produktif dan sejahtera.

Bagi Pembaca:

1. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dalam mengkaji fenomena sosial masyarakat.

2. Mampu membantu untuk menganalisis dan dapat memotivasi dalam memberikan pendapat/ide yang tepat dan kreatif pada fenomena sosial yang diteliti.

1.5 Sistematis Penulisan

Dari skripsi ini memiliki beberapa system penulisan yang terbagi menjadi beberapa sub-bab yang memiliki penjelasan berbeda-beda untuk menjelaskan topic penelitian. Berikut sistematika penulisan skripsi:

a. Bagian Muka

Pada bagian muka, penelitian ini berisikan cover yang berisikan logo universitas, judul skripsi yaitu “Implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan perempuan di Kelurahan Jatirangga” beserta dengan informasi-informasi yang mendukung lainnya seperti penulis, tujuan pembuatan, informasi universitas serta tahun pembuatan.

b. Bagian isi

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat bagi peneliti dan pembaca, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II merupakan isi dari kajian pustaka yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori untuk menganalisis masalah. Terdapat juga penjelasan Teori “Pemberdayaan” Jim lfe dan Teori “Feminisme Liberal” dari Betty Frieden yang menjadi acuan untuk pelaksanaan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III ini terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu metode penelitian kualitatif, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu gambaran umum atau profil Kelurahan dan PKK, hasil pembahasan, analisis teori.

BAB V KESIMPULAN

Bab V merupakan penutupan dari hasil penelitian dengan menuliskan kesimpulan dan terdapat juga saran dari penelitian kepada berbagai pihak terkait sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dicapai

